

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hongkong merupakan salah satu regional yang terletak dibagian negara Republik Rakyat China. Penduduk asli Hongkong pada awalnya adalah sebuah kelompok etnis yang terbentuk oleh orang-orang yang berasal dari etnis China yang jumlahnya mencapai kurang lebih 93,7 % dari banyaknya populasi. Tetapi setelah akhir Perang Dunia II hingga saat ini penduduk Hongkong kebanyakan merupakan keturunan imigran dari daratan China dan imigran dari seluruh dunia. Hongkong yang terletak di muara timur Sungai Mutiara, termasuk diantaranya terdapat pulau Kwuloon, Xinjie serta pulau kecil lainnya, dengan luas wilayah kurang lebih 1098,05 kilometer persegi. Kemudian di akhir tahun 2002, jumlah penduduk Hongkong kurang lebihnya 6,1858 juta jiwa.

Hongkong menjadi salah satu daerah administratif khusus dimana sebuah status administrasi ini muncul sebagai konsekuensi kebijakan Satu Negara Dua Sistem di Republik Rakyat China. Satu Negara Dua Sistem merupakan kebijakan politik khusus yang di gagas oleh Deng Xiaoping untuk penyelesaian masalah status Hongkong yang pada saat itu dikembalikan kedaulatannya dari jajahan Inggris kepada Republik Rakyat China, yang pada intinya menekankan bahwa dalam naungan satu negara, Hongkong berhak menikmati sistem pemerintahan yang berbeda dan otonomi yang luas dari pemerintah China, terkecuali di bidang pertahanan dan luar negeri.

Pada tanggal 1 Juli 1997, daerah Hongkong secara resmi diserahkan oleh pemerintah Britania Raya (Inggris) kepada Republik Rakyat China. Dengan kata lain

sebelum Hongkong diserahkan pada tanggal 1 Juli tahun 1997, Hongkong merupakan koloni Britania Raya (Inggris). Di bawah kebijakan Satu Negara Dua Sistem ciptaan Deng Xiaoping, Hongkong berhak menikmati otonomi dari pemerintah RRC seperti pada sistem hukum, mata uang, bea cukai dan imigrasi. Namun pada prakteknya, masih banyak kebebasan dan aspirasi masyarakat Hongkong yang dicampuri dan dikekang oleh pemerintah pusat di China. Seharusnya urusan yang ditangani oleh pemerintah China hanyalah masalah pertahanan nasional dan hubungan diplomatik. Otonomi ini berlaku di Hongkong (minimal) untuk 50 tahun dihitung dari tahun 1997<sup>1</sup>.

Kondisi ekonomi Hongkong sebelum menjadi bagian dari China dapat dibilang sangat mapan. Pada masa Deng Xiaoping, intensitas kerjasama antara Hongkong dengan China meningkat. Kerjasama yang dilakukan oleh China dan Hongkong antara lain transfer pekerja terlatih dan penyediaan bagi para investor, baik dari China maupun asing. Oleh karena itu di Hongkong perusahaan tidak hanya bergerak di bidang industri (perpabrik) namun juga dengan cara bisnis, dimana mereka menyediakan layanan dalam pembiayaan, layanan profesional.<sup>2</sup> Sektor industri Hongkong yang sudah cukup modern ini juga yang pada awalnya dimanfaatkan oleh Deng Xiaoping dalam upayanya “membuka” perekonomian China. Dengan adanya otoritas di segi administratif, Hongkong berhak mengembangkan perindustriannya serta mengatur jalannya imigrasi. Namun, semuanya tidak akan lepas dari pemerintahan pusat di China dan Hongkong juga merupakan salah satu pendukung China dalam menjadi salah satu ikon perdagangan dan kemajuan ekonomi di Asia.

---

<sup>1</sup> Cecep Zakarias El Bilad, *SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HONGKONG*, November 19, 2008, 11:19 pm. <https://zakariaselbilad.wordpress.com/2008/11/19/sejarah-dan-perkembangan-hongkong>. Diakses 20 Oktober 2014.

<sup>2</sup> Sharif, Naubahar and Mitchell M. Tseng. 2011. “*The Role of Hong Kong in Mainland China's Modernization in Manufacturing*” dalam *Asian Survey*, Vol. 51, No. 4 (July/August 2011), University of California Press, pp. 633-658. Diakses pada 21 Oktober 2014.

China sebagai negara superpower di kawasan Asia Timur memiliki dinamika didalam pemerintahannya. Salah satu dinamika kebijakan yang ada di China adalah adanya *Special Administration Regions (SAR)*. *Special Administration Regions* adalah sebuah daerah di China yang menggunakan prinsip “*one country two system*”, seperti yang sedikit telah di bahas di atas, bahwa prinsip “Satu Negara Dua Sistem” ialah dimana hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan dan militerlah yang menjadi wewenang dari pemerintah Republik Rakyat China, sedangkan bidang-bidang lain seperti yang sudah jelaskan diatas seperti diantaranya mengenai perdagangan, mata uang, dan imigrasi seharusnya menjadi wewenang bagi penerima administrasi yang khusus, yaitu Hongkong.

Di China daerah-daerah yang mendapatkan keistimewaan ini adalah Hongkong dan Macau. Kemudian adapun yang menyebabkan Hongkong dan Macau menjadi SAR, adalah sebagai berikut:

Pertama, daerah administrasi khusus Hongkong. Seperti yang kita ketahui, dilihat dari sejarahnya Hongkong merupakan daerah koloni dari Inggris. Dimana Inggris mulai menduduki Hongkong sejak tahun 1842. Dibawah kependudukan Inggris, Hongkong menjadi pusat perdagangan dan kota industri yang maju. Namun juga hongkong sempat mengalami krisis ketika China mendapatkan sanksi embargo dari PBB akibat perang Korea pada tahun 1950, namun ketika perang Korea berakhir pada tahun 1953 perekonomian Hongkong mulai menggeliat maju lagi dan menunjukkan hasil yang signifikan bagi pertumbuhannya. Hal ini membuat Hongkong memiliki fokus yang sangat besar dalam bidang perekonomian dibandingkan bidang politik.

Selanjutnya pada tahun 1982 Perdana Menteri Margareth Thatcher mengunjungi China untuk merundingkan status Hongkong dengan pemerintah China. Pemerintah China selanjutnya membuat sebuah kebijakan yang tertuang dalam pasal 31 yang mengizinkan Hongkong untuk menjadi *Special Administrative Regions*. Dan kemudian terbentuklah *Joint Declaration* antara China dengan Inggris pada tahun 1984 yang ditandatangani oleh PM Margareth Thatcher selaku perwakilan dari Inggris dan PM Zhao Ziyang selaku perwakilan dari China. Deklarasi ini berisi beberapa poin penting diantaranya yaitu, China akan melanjutkan kedaulatannya atas Hongkong dihitung efektif sejak 1 Juli 1997, Hongkong akan menjadi SAR dan dapat memiliki otonomi yang lebih tinggi kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, dan pertahanan militer.<sup>3</sup> Ranah-ranah yang menjadi kewenangan daerah administratif khusus Hongkong adalah seputar pada bidang ekonomi dan hubungan budaya.

Kedua, daerah administrasi khusus Macau. Macau merupakan salah satu daerah dari China yang menerima SAR selain Hongkong. Pada tahun 1516 Portugis masuk ke Macau dan mulai menduduki daerah ini, dan menjadikan Macau sebagai pelabuhan bagi para pedagang Portugis. Pada saat itu China tidak mengakui kedaulatan Portugis atas Macau, namun pada tahun 1577 pemerintah China mengakui kependudukan Portugis atas Macau, sehingga dalam kependudukannya Portugis tetap harus membayar biaya sewa kepada pemerintah China. Portugis menjadikan Macau sebagai pelabuhan untuk menghubungkan perdagangan antara China dengan Jepang, dan Lisbon dengan Nagasaki. Seringkali terjadi persinggungan antara Portugis dan China dalam mengelola Macau, keduanya menggunakan strategi-strategi khusus untuk dapat memperbesar pengaruh mereka masing-masing di Macau.

---

<sup>3</sup> *Ibid.* Lie, Tek Tjeng. 1983.

Pada tahun 1974 terjadi revolusi Portugis dan Revolusi Macau dimulai dan seiring dengan berjalannya waktu pengaruh Portugis di Macau semakin berkurang<sup>4</sup>. Hal inilah yang memunculkan keinginan pemerintah China untuk menerapkan otonomi khusus *Special Administrative Regions* kepada Macau seperti yang diberikan pada Hongkong. Pada tanggal 13 April 1987 pemerintah Republik Rakyat China dengan Portugis menandatangani *Joint Declaration* yang berisi keinginan China untuk memberikan otonomi khusus kepada Macau yaitu *Special Administrative Regions*. China juga menekankan bahwa esensi dari SAR ini adalah Macau akan memiliki otoritas yang lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya yang tidak memiliki SAR dalam mengatur daerahnya kecuali masalah politik luar negeri dan pertahanan keamanan yang tetap menjadi wewenang China. *“The result was a 1987 agreement returning Macau to Chinese sovereignty as a Special Administrative Region (SAR) of China on December 20, 1999”*.<sup>5</sup> Yang artinya bahwa SAR di Makau benar-benar baru terwujud pada 20 Desember 1999 dan memiliki hukum dasar yang mengaturnya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan China, Hongkong dan Macau adalah hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah administratif khususnya. Pemerintah pusat yang mengurus perihal mengenai hubungan luar negeri dan pertahanan militer, sedangkan Hongkong dan Macau mengurus bidang-bidang lain selain kedua bidang yang bukan menjadi wewenang dari pemerintah RRC.

---

<sup>4</sup> Edmonds, Richard Louis dan Herbert S. Yee. 199. *Macau : From Portuguese Autonomous Territory to Chinese Special Administrative Region*. London : Cambridge University Press. diunduh pada 1 April 2012. Diakses pada 13 Maret 2015.

<sup>5</sup> Anonim. 2011. *Macau Special Administrative Region*. Bureau of East Asian and Pacific Affairs [online] tersedia dalam : <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/7066.htm>. Diakses pada 13 Maret 2015.

Kemudian munculah Gerakan kemerdekaan Hongkong . Gerakan ini menuntut kemerdekaan agar Hongkong lepas dari China. Sebagian dari mereka ingin agar Hongkong menjadi negara kota seperti pendahulunya yaitu Singapura. Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh Universitas Hongkong pada tahun 2007, 35,3% rakyat Hongkong lebih memilih kemerdekaan dari pada menjadi wilayah otonom khusus di bawah RRT, dan angka ini meningkat dari yang tadinya hanya 22% pada tahun 2005, sementara 64,7% responden merasa Hongkong sebaiknya tidak merdeka. Sementara itu, dari 35,3% responden yang mengatakan mereka lebih memilih kemerdekaan tidak mau jika Partai Komunis masih menguasai RRT hingga tahun 2047, dimana hal ini ditandai ketika Deklarasi Gabungan China-Britania sudah kadaluwarsa atau berakhir.<sup>6</sup> Pergerakan ini tidak sama dengan gerakan otonomi Hongkong, yang lebih menganjurkan peningkatan otonomi Hongkong daripada kemerdekaan.

## **B. Pokok Permasalahan**

Dari latar belakang masalah dan sejarah yang panjang terkait hubungan Hongkong dengan China yang telah dipaparkan, maka akan memunculkan berbagai sikap dari rakyat Hongkong yang membuat rakyat Hongkong akhirnya menginginkan memisahkan diri dari China. Oleh karena itu dapat ditarik suatu perumusan masalah yaitu “ Mengapa rakyat Hongkong ingin memisahkan diri dari China?

---

<sup>6</sup> [South China Morning Post, 7 February 2005,http://web.archive.org/web/20050215214319/http://www.asiamedia.ucla.edu/print.asp?parentid=20474](http://www.asiamedia.ucla.edu/print.asp?parentid=20474) diakses 24 Oktober 2014.

## C. Kerangka Konseptual

### A. Konsep Secession

*Secession* merupakan istilah dari upaya memisahkan diri sebuah kelompok atau bangsa dari sebuah negara untuk mendirikan sendiri negara yang berdaulat. Menurut Horowitz, *secessionism* adalah “*the attempt by an ethnic group claiming a homeland to withdraw with its territory from the authority of a larger state of which it a part,*”<sup>7</sup> yang artinya "Upaya yang dilakukan oleh kelompok etnis yang mengklaim tanah air untuk menarik dengan wilayahnya dari otoritas negara dengan bagian yang lebih besar". Pavkovic dan Radan juga menjelaskan pengertian *secession* merupakan proses suatu kelompok menarik diri dari wilayah dan kependudukannya untuk mendirikan negara baru pada wilayahnya tersebut<sup>8</sup>.

*Secession* merupakan konflik yang menjadi perhatian di seluruh dunia, karena bisa terjadi di negara mana saja dan kapan saja. Seperti yang sudah pernah terjadi pada Timor Leste dan Indonesia, Eritrea dan Ethiopia, Somaliland dari Somalia, serta kelompok atau bangsa lainnya. Ini membuktikan *Secession* dianggap menjadi sebuah solusi atau cara terakhir yang bisa diambil oleh sebuah kelompok, atau ketika suatu kelompok sedang menghadapi situasi yang tidak memungkinkan dengan berada di bawah pemerintahan yang berbeda pandangan, berbeda etnis, dan berbeda tujuan maka upaya memisahkan diri dianggap pilihan yang tepat untuk mengubah nasib yang akan lebih baik dari pada memilih tetap bersama negara induk.

---

<sup>7</sup> Horowitz, Donald, (1991), *Irridentas and Secessions: Adjacent Phenomena, Neglected Connection* , N. Chazan (ed.) *Irridentism and International Politics*, Lynne Rienner, hal. 11, seperti dikutip oleh David S. Siroky, *Secession and Survival: Nations, States and Violent Conflict*, Department of Political Science Duke University, hal 20.

<sup>8</sup> Pavkovic, Alexander and Radan, Peter (2001) (ed), ‘*The Ashgate Research to Companion to Secession*’, UK, MPG Groups Book, 2011, hal 1

## **Teori Secessions**

Menurut Jason Sorens, Manakala Perbedaan etnisitas dan ideologi suatu kelompok atau bangsa tersebut mengalami peningkatan kesadaran identitas, ketidakadilan ekonomi dan adanya Otonomi yang gagal dari janji-janji yang tidak diberikan maka semakin tinggi tingkat kemungkinan untuk pemisahan diri.

### **a. Adanya perbedaan etnis dan ideologi atas kesadaran identitasnya yang berbeda dengan negara induk.**

Jason Sorens mengungkapkan bahwa identitas etnis dan wilayah adalah kunci utama menuntut pemisahan diri sebuah wilayah atau bangsa dari negaranya<sup>9</sup>. Dimana ini adalah salah satu unsur yang menjadi dasar untuk mengklaim pemisahan diri. Keragaman identitas etnis ini membuat atau menjadikan modal utama kepercayaan bagi anggotanya agar mendapatkan struktur insitusi yang dianggap mungkin dapat untuk mempersatukan anggotanya dalam ikatan politik. Sehingga akan terkonsep bahwa memiliki perbedaan identitas akan menjadi pembenaran mereka untuk membolehkan mereka memisahkan diri dari negara induknya. Ini berarti Identitas etnis dapat digunakan sebagai alat untuk memobilisasi pendukung *secessionism*.

### **b. Ketidakadilan Ekonomi**

Bookman telah menjabarkan beberapa tahapan sebuah bangsa untuk memisahkan diri,<sup>10</sup> yang pertama dimulai dengan tahap evaluasi hubungan dengan negara induk, jika hasil dari evaluasi tidak memuaskan maka masyarakat akan berpikir untuk mengajukan

---

<sup>9</sup> Sorens, Jason, (2012), *Secessionism: Identity, Interest, and Strategy*, McGill-Queen's Press, hal 15

<sup>10</sup> Grizzell, James, 2014, "Secession Demands and Implicit Calculations: The dynamics driving the secession crises in Scotland and Catalonia", Copenhagen Business School, dalam Bookman, Milica Zarkovic (1993) *The Economics of Secession*, New York: St. Martin's



tuntutan. Tuntutan ini tidak berarti harus langsung menjadi tuntutan memisahkan diri, tetapi akan mengusulkan persepsi ketidakadilan ekonomi sebagai akar penyebab aspirasi *secession*. Setelah tahap evaluasi *secession* akan bergerak ke fase redefinisi, yaitu mempertimbangkan kembali hubungan antara *secessionis* dengan negara induk dalam faktor ekonomi dan pemerintah. Tahap terakhir adalah tahap pengambilan keputusan, mempertimbangkan kelayakan ekonomi dari usaha mendirikan negara baru adalah faktor yang paling penting dalam fase ini.

Dorongan rakyat yang ingin memisahkan diri semakin meruncing jika wilayah tersebut tidak terlalu bergantung pada perekonomian negara induk. Ini akan menunjukkan kemandirian wilayah tersebut dalam ekonominya. Faktor lain yang juga mendorong dukungan masyarakat untuk memisahkan diri adalah adanya pandangan atau persepsi terhadap negara induk karena melemahnya perekonomian negara induk atau juga kekalahan perang yang diderita oleh negara induk karena masyarakat akan terpengaruh dengan perhitungan kalkulasi untung-rugi jika akan tetap bergabung atau jika mereka berpisah dengan negara induk. Seperti yang dikatakan Jason Sorens, “*regions that benefit economically from internal sovereignty are more secessionist than regions do not. Relative affluence (in democracies only), mineral resources, population, geographic separation, sea acces, and economic globalization should promote popular demands for secessions*”<sup>11</sup> Perhitungan keuntungan ini juga memengaruhi basis dukungan kelompok nasionalis, hal ini didasari oleh anggapan bahwa setiap orang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar oleh karena itu mereka akan mendukung upaya pemisahan diri dengan jika mereka melihat harapan bahwa dengan menjadi independen akan memperbesar kesempatan mereka untuk memperbaiki perekonomian.

---

<sup>11</sup> Ibid 10 hal 32

### c. Kegagalan Otonomi

Jason Sorens mengatakan bahwa disaat kemungkinan negara induk mendiskusikan peningkatan otonomi dan kemudian gagal untuk memberikan, Hal seperti itu akan menciptakan atau memperdalam ketidaksesuaian antara janji-janji otonomi dan realitas yang mengatur, keadaan demikian akan lebih mendorong *secession* dari pada penolakan otonomi secara langsung.<sup>12</sup>

Seperti yang dikatakan Jason sepertinya kegagalan Otonomi menjadi alasan yang kuat untuk munculnya gerakan *secessionis* karena biasanya komunitas atau bangsa tidak merasa puas dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh negara induk setelah diberi harapan palsu. Mencari kedaulatan penuh adalah pilihan *secession* setelahnya sehingga dengan mendirikan negara sendiri *secessionis* akan mampu membentuk suatu pemerintahan yang memiliki kendali penuh dalam urusan yang menyangkut negerinya sendiri dalam suatu wilayah atau batas teritorial atau geografisnya, dan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yurisdiksi hukum sendiri tanpa harus berharap pada Otonomi dari negara induk.

Jika *Secession* dianggap dapat lebih baik dari otonomi, budaya, ekonomi dan politik dari yuridikasi otonomi politik negara induk maka akan muncul keinginan sebuah wilayah untuk menentukan nasib sendiri (*The Right of Self Determination*). Menentukan nasib sendiri merupakan salah satu bentuk dari Hak Asasi Manusia. *Self determination* dalam bentuk negara dapat diartikan bahwa semua negara atau bangsa mempunyai hak untuk membentuk sistem politiknya sendiri dan memiliki aturan internalnya sendiri secara bebas untuk mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri dan untuk menggunakan sumber daya alam yang mereka miliki.

---

<sup>12</sup> Sorens, Jason, 2004, "Globalization, Secessionism, and Autonomy." *Electoral Studies*, hal 733

Dari penjelasan mengenai *Secession* yang akan memunculkan keinginan sebuah wilayah untuk menentukan nasib sendiri (*The Right of Self Determination*). Seperti yang dialami Pulau Hongkong, dimana Hongkong sejak awal telah menawarkan berbagai kemungkinan, yaitu memiliki pelabuhan dengan laut yang dalam. Pelabuhan ini diperlukan untuk berlabuh kapal-kapal besar. Kombinasi antara posisi strategis untuk bisnis dan pertahanan yang cermat, menyebabkan nilai Hongkong makin tinggi.

Sehingga hal ini yang mendorong Inggris saat itu untuk menduduki Hongkong. Para pedagang Inggris yang melakukan bisnis di Guangzhou, dibatasi dan diperlakukan dengan ketat oleh para pejabat China.

Selain itu Hongkong diperlukan sebagai tempat dimana mereka bisa berlabuh memperbaiki kapal dan menyimpan barang dengan aman. Jejak keberhasilan Inggris dalam membangun hongkong adalah bahwa Inggris telah mampu mengubah bukit gersang dan gundul ini menjadi hutan beton penuh gedung pencakar langit.

Hal inilah yang mendorong Hongkong ingin menentukan nasib sendiri (*The Right of Self Determination*). Namun Hongkong menikmati menentukan nasib sendiri (*The Right of Self Determination*) tidak begitu lama. Karena setelah lepas dari Inggris, Hongkong tidak serta merta lepas dari kekuasaan dan pengaruh 'luar'. Melainkan kini dikuasai oleh China yang sudah lama menginginkan wilayah strategis perdagangan ini nampak menyabut dengan gembira pelepasan hongkong dari tangan Inggris pada tahun 1997.

## **D. Hipotesis**

Berdasarkan hubungan antara latar belakang masalah dengan kerangka konseptual, penulis melihat munculnya alasan rakyat Hongkong untuk memisahkan diri dari China adalah sebagai berikut:

1. Rakyat Hongkong khawatir akan terjadi perubahan sistem dari demokrasi-kapitalis menjadi komunis-sosialis ala China.
2. Perekonomian hongkong yang terus meningkat menjadi faktor pendorong untuk menjadi negara independen.
3. Otonomi yang gagal untuk menjamin hak politik rakyat Hongkong dari janji-jani yang tidak pernah dipenuhi.

## **E. Metedologi Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, akan digunakan metode pengumpulan data melalui pencarian untuk pertanyaan yang telah diajukan dapat terjawab dengan baik, maka akan menggunakan metode sebagi berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan suatu persoalan dengan mencari fakta-fakta yang terjadi untuk dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang akurat terhadap kasus yang diteliti.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang akan dipakai pada penelitian ini mendasar pada data sekunder, yang berarti data diperoleh dari hasil atau bahan-bahan dokumenter tentang obyek penelitian seperti buku, jurnal ilmiah, dan berita dari surat kabar maupun internet .

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik kapustaka (*library research*). Sesuai dengan penggunaan data sekunder maka pencarian data akan difokuskan data-data pustaka yang akan di seleksi kemudian dianalisis untuk mendapatkan hasil yang baik.

### 4. Analisis Data

Analisis data adalah data yang diperoleh dari penelitian ini akan disusun secara sistematis dan logis. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini akan dibatasi agar tidak terlalu melebar yaitu anantara tahun 2006 – 2014. Teori *secession* yang digunakan akan ditekankan hanya pada faktor etnis, faktor ekonomi saja dan faktor politik. Tujuannya untuk mempermudah penulis dalam menganalisa persoalan yang akan dilakukan sehingga penulisan menjadi lebih jelas, dan diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal.

## **G. Sistematika Penulisan**

**Pada bab I**, merupakan Bab pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teoritik, Hipotesis, Jangkauan Penelitian, Metedologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**Pada bab II**, akan membahas tentang keterkaitan Hongkong terhadap China dengan menjelaskan mengenai keadaan Geografis Hongkong dan Keadaan Geografis Cina, kemudian berlanjut membahas kedatangan Bangsa Barat ke Cina, Kekuasaan Inggris Atas

Wilayah Hongkong dan yang terakhir membahas mengenai pengaruh kembalinya hongkong bagi RRC dan Dunia Internasional.

**Pada bab III** akan memaparkan dinamika ekonomi dan politik hongkong sebagai bagian dari RRC. Mulai dari Sistem Perekonomian Hongkong, Kebijakan Politik Hongkong, Peran Partai Politik dalam pelaksanaan Reformasi Di Hongkong, Peran Pemerintahan dalam reformasi Hongkong dan yang terakhir tentang Isu pemisahan Diri Hongkong.

**Pada bab IV** akan dipaparkan alasan apa saja yang membuat rakyat Hongkong memutuskan untuk memisahkan diri dari RRC. Alasan-alasan ini sesuai dengan penerapan teori yang akan digunakan. Sehingga hipotesa akan dibuktikan secara jelas pada bab ini.

**Pada bab V** yang merupakan penutup dari tulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan. Kesimpulan ini adalah inti dari isi bab-bab sebelumnya yang telah diteliti hingga rumusan masalah yang telah dipaparkan dapat terjawab dengan jelas.